

MENGUNGKAP PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI TRADISIONAL SUBAK (STUDI PADA SUBAK TEBA MENGWI BALI)

Ketut Tanti Kustina¹⁾, Ni Putu Happy Harimas Sujana²⁾

Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar

tantikartika16@yahoo.com, hsujana@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out financial management in practice or the application of good corporate governance principles to the traditional subak organization in Bali specifically the Subak Teba Abian Base Mengwi Badung Bali. The research method was carried out by conducting in-depth interviews with sub-Teba staff / members including the subak administrator and documentation study.

The results of this study indicate that the practice of applying the principles of good corporate governance on Teba Abianbase Subak can be seen from the responsibility of subak organizations in reporting their financial reports that meet the quality characteristics of accounting information, which is honest, neutral, and can be understood by subak. The quality of accounting information will be a benchmark for organizations such as Subak that are still simple in their financial management in applying the principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness that have been carried out since long ago in running their organizations. So that subak krama does not lose trust in subak organizations and can always uphold a sense of family and mutual cooperation.

Keywords: good corporate governance, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, Subak.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang termasuk dalam praktik atau pelaksanaan asas-asas *good corporate governance* pada organisasi tradisional Subak di Bali khususnya Subak Teba Abian Base Mengwi Badung Bali. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam pada *krama* / anggota subak Teba termasuk pengurus subak dan juga dilakukan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penerapan asas-asas *good corporate governance* pada Subak Teba Abianbase terlihat dari tanggungjawab organisasi subak dalam melaporkan laporan keuangannya yang memenuhi karakteristik kualitas informasi akuntansi yaitu penyajian jujur, netral, dapat dipahami krama subak, Kualitas informasi akuntansi ini tentunya akan menjadi tolok ukur untuk sebuah organisasi seperti Subak yang masih bersifat sederhana dalam pengelolaan keuangannya dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan *fairness* yang sudah dilakukan sejak dahulu dalam menjalankan organisasinya Sehingga krama subak tidak hilang kepercayaan terhadap organisasi subak dan dapat selalu menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan gotong royong.

Kata Kunci : *good corporate governance*, transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, *fairnes*, Subak.

PENDAHULUAN

Bali merupakan provinsi yang memiliki keunikan tersendiri, berbagai warisan budaya yang dimiliki membuat provinsi Bali menjadi destinasi wisata yang paling dituju oleh wisatawan (Sutawan, 2008). Sekian dari banyaknya keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali yaitu organisasi tradisional *subak*. *Subak* merupakan organisasi yang didirikan untuk mengelola sistem pengairan pertanian masyarakat adat Bali yang senantiasa diidentikkan dengan kesederhanaan dan sifat tidak modern. Aktifitas operasional *subak* tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber air sawah, tetapi *subak* juga melaksanakan kegiatan yang bersifat religius dan pembangunan yang memerlukan banyak dana. *Subak* didirikan dengan kesederhanaan yang jauh dari perkembangan jaman, tingkat pendidikan *krama subak* juga relatif rendah. Namun, *subak* tidak pernah kehilangan kepercayaan untuk mengelola sumber daya yang beragam, baik yang diperoleh dari *krama subak*, bantuan, maupun sumbangan sehingga keberadaan *subak* masih tetap eksis hingga saat ini (Sutawan, 2008). UNESCO bahkan mengakui *subak* sebagai salah satu yang menjadi bagian dalam daftar warisan dunia pada tanggal 29 Juni 2012. Dengan demikian *subak* bukan hanya merupakan lembaga tradisional saja namun bagian aset penting untuk Indonesia sebagai warisan budayanya

Subak pada khususnya sebagai salah satu organisasi publik non pemerintah dan organisasi nirlaba yang juga tidak luput dari berbagai kritik dan tuntutan dari pihak pemberi sumbangan (pemerintah) dan juga pihak eksternal lainnya serta dari anggotanya yang memerlukan keterbukaan penggunaan dana dan pengelolaan keuangan. Menurut Martani (2015) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2015 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dimana entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan *society*. Dalam suatu organisasi pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada *krama Subak* sebagai pihak yang berkepentingan dalam kepengurusan *subak*.

Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang atau dana organisasi. Adanya pengelolaan keuangan dalam organisasi *subak* juga diharapkan dapat menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan *subak* yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan organisasi tradisional tersebut dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya.

Good corporate governance tidak akan terwujud tanpa adanya unsur-unsur organisasi yang kuat. Ada lima unsur yang harus diterapkan dalam sebuah organisasi dalam mewujudkan *good corporate governance* yaitu transparansi, accountability, responsibilitas, independensi dan fairness (Yuniarta, 2015). Dari lima unsur *good corporate governance* harus dapat dipenuhi dalam laporan keuangan *subak*. Penelitian pada *subak* jarang dilakukan karena *subak* sering dianggap sebagai lembaga tradisional kecil yang beranggotakan masyarakat mayoritas petani sehingga tidak begitu memerlukan penerapan *good corporate governance* dalam kualitas pelaporan keuangannya dianggap tidak penting untuk keberlangsungan *subak*. Namun sekarang dari sektor pertanian, *subak* di Bali merupakan warisan budaya Indonesia dan telah diakui UNESCO. Dengan demikian *subak* bukan hanya merupakan lembaga tradisional saja namun bagian aset penting untuk Indonesia sebagai warisan budayanya. *Subak* yang notabene memiliki otonomi rumah tangga sendiri maka dari itu diperlukannya penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan keuangan agar keberlangsungan *subak* dapat ditata kelola dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan adalah " Bagaimana praktik atau penerapan asas-asas *good corporate governance* yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan organisasi tradisional *Subak Teba Abian Base?*"

Menurut Sutedi (2012) *Governance* yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks *good corporate governance* ada yang menyebut tata pamong. *Corporate Governance* dalam definisinya sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham yang dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai - nilai etika.

Selain memiliki otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri, subak juga menerapkan prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Semua prinsip tersebut pada hakikatnya adalah refleksi dari *good corporate governance*. *Governance* subak adalah pembentukan aturan-aturan kerja yang spesifik untuk mengalokasikan, memberikan tanggung jawab dalam memobilisasi sumberdaya, menyelesaikan perselisihan, mencatat informasi, mengumumkan informasi, memilih dan memberikan imbalan kepada pengurus dan petugas-petugas yang lainnya, serta memberikan sanksi-sanksi kepada pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada.

Menurut SK Menteri BUMN Nomor : Kep.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* yang dikutip oleh Fatimamah (2012) dijelaskan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

- 1) Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.
- 2) Kemandirian (*Independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 3) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif.
- 4) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Kewajaran (*Fairness*), yaitu perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penerapan *good corporate governance* pada subak setiap pengambilan keputusan selalu berlandaskan, yaitu :

- 1) Prinsip Demokrasi
Dilihat dari kenyataannya subak dalam penerimaan menjadi anggota dan pemilihan pengurus diputuskan secara musyawarah mufakat, tidak berdasarkan status sosial dan ekonomi, agama dan asal banjar atau desa (Sutawan, 2008 :45).
- 2) Prinsip Keadilan
Subak sangat menjunjung tinggi prinsip ini. Kewajiban yang harus dipikul oleh anggota subak selalu terkait dan sesuai dengan hak-haknya termasuk faktor-faktor lainnya berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya dalam masalah pembagian air (Sutawan, 2008 :46).
- 3) Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Setiap ada rapat subak, *pekaseh* selaku ketua subak melaporkan kepada anggotanya apa yang telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya serta rencana-rencana apa yang

perlu dikerjakan. Pada kesempatan itu pula diumumkan secara terbuka siapa saja yang belum melunasi iuran dan kewajiban lainnya (Sutawan, 2008 :47).

Dari uraian diatas, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan Subak dengan memiliki otonomi rumah tangga sendiri, subak tentunya selalu menerapkan prinsip-prinsip *governance* dengan baik. Setiap rapat *pekaseh* selaku ketua subak melaporkan kepada anggotanya tentang apa saja yang telah dilaksanakan serta bagaimana hasilnya.

Menurut PP No. 23 tahun 1982 tentang irigasi, irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem dan karena subak adalah lembaga irigasi maka subak juga adalah sebuah sistem irigasi.

Ada berbagai definisi atau pengertian subak yang selama ini pernah diberikan oleh banyak peneliti dan pemerhati subak. Beberapa definisi tentang subak yang dikutip dari (Sutawan, 2008), yaitu :

- a) Subak adalah masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio-agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu sumber air dalam suatu daerah (Peraturan Daerah No.02/PD/DPRD/1972).
- b) Subak dapat didefinisikan sebagai lembaga irigasi dan pertanian yang bercorak sosio-religius terutama bergerak dalam pengelolaan air untuk produksi tanaman setahun khususnya padi berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana* (Sutawan, 2002:80).
- c) Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio-agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai suatu organisasi di bidang tata guna air di tingkat usahatani (Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 1982 tentang irigasi).

Menurut Yuniarta dkk, (2015) dalam Pitana (1997) Sunaryasa (2002), Sistem *subak* merupakan ciri khas sistem pertanian di Bali. *Subak* di Bali memiliki lima ciri, yaitu:

- a) *Subak* merupakan organisasi petani pengelola air irigasi yang memiliki pengurus dan peraturan organisasi (*awig-awig*) baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b) *Subak* mempunyai suatu sumber air bersama, berupa bendungan (*empelan* ataupun saluran utama suatu sistem irigasi).
- c) *Subak* mempunyai suatu areal persawahan.
- d) *Subak* mempunyai otonomi, baik internal maupun eksternal.
- e) *Subak* mempunyai satu atau lebih pura yang berhubungan dengan per*subakan*.

Konsep kebersamaan dalam kelompok petani di Bali diaplikasikan melalui kegiatan gotong royong yang merupakan ciri yang kuat dari masyarakat petani Bali. Berpijak dari kegotong royongan inilah kepentingan bersama dilandasi rasa *paras paras selunglung sebayantaka* (tenggang rasa, susah dan senang sama ditanggung bersama), semua yang terkait dengan masalah pertanian disatukan, sehingga munculah suatu organisasi sosial yang disebut *subak* (Yuniarta dkk, 2015).

Pengertian menurut Standar Akuntansi Keuangan (2010:6) adalah informasi memiliki kualitas jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dalam Fatimamah (2012), dinyatakan bahwa andal memiliki arti bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dapat diverifikasi secara netral. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Secara teoritis menurut Harahap (2011), karakteristik kualitatif adalah:

- 1) Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan biasanya tidak luput dari risiko penyajian yang kurang jujur dari apa yang sebenarnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

2) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan juga harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan arena itu tidak dapat diandalkan dan tidak dapat ditinjau dari segi relevansi.

3) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

4) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

Pengelolaan keuangan sangat penting dalam setiap perusahaan, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat memperlancar aktivitas perusahaan. Menurut Syarifudin definisi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut "Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban"(2005:89).

Sedangkan definisi pengelolaan keuangan lainnya yaitu: "Tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi". Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengelolaan keuangan yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.
- b. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan.
- c. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi-transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.

Menurut Martani (2015) Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan *society*. Pengelolaan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik :

- a) Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan labatidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba.
- c) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Tujuan utama dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

Organisasi nirlaba menggunakan PSAK atau SAK ETAP dengan pelaporan menggunakan PSAK 45. Karakteristik bentuk organisasi ini karena tidak ada kekayaan yang dimiliki organisasi sehingga ekuitasnya berupa aset bersih. Untuk pemisahan dana terikat dan tidak terikat bukan keharusan tergantung dari karakteristik organisasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Subak Teba Abianbase dengan metode kualitatif yang menitik beratkan pada deskripsi dan intepretasi perilaku manusia. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam pada *krama* subak Teba termasuk pengurus subak, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya berupa laporan kas Subak dari periode tertentu, dokumen-dokumen, bahan-bahan kepustakaan, dan informasi lain yang memberikan tambahan penjelasan untuk penelitian ini. Informian dalam penelitian ini ditunjuk secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Beberapa teknik digunakan secara triangulasi dengan tujuan keabsahan data terjamin. Data diolah dengan mempergunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Moleong (2005), yaitu: a) Reduksi data (*data reduction*), b) Penyajian data (*data display*), dan c) Analisa data dan penarikan simpulan (*verifikasi*) berdasarkan teori yang telah ditentukan. Atmadja dalam Lestari (2015) menjelaskan bahwa kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penarikan simpulan dan penyajian data merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan bisa berlangsung secara ulang-alik, sampai mendapatkan hasil penelitian akhir yang bersifat holistik dan sarat makna, dalam konteks pemberian jawaban terhadap masalah yang dikaji.

PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Daerah Bali Nomor 12/PD/DPRD/1972 tanggal 13 Desember 1972, mengenai tentang irigasi di Bab I pasal 4 yang menyatakan bahwa "Subak adalah masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris religious yang secara historis didirikan sejak dahulu kala berkembang terus sebagai organisasi pengusaha tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu Daerah".

Bali merupakan provinsi di Indonesia yang sudah terkenal kemancanegara. Yang selalu membuat untuk berkunjung ke Bali adalah Bangunan, tata karma dan subak. Subak adalah organisasi para petani untuk memperoleh air disawahnya. Selain itu Subak mengatur para anggota *kramanya* di sawah agar tidak terjadi kekurangan air, mengatur penggunaan *empelan*, temuku, dan juga mengatur tentang upakara dan upacara di sawah.

Menceritakan tentang adanya Subak Teba menurut para tetua dahulu, di Subak Gede Kapal ada lima subak yang bergabung yaitu Subak Tegen, Subak Dukuh, Subak Perang, Subak Serobian dan Subak Teba. Menurut lokasi tempat diantara kelima subak ini, Subak Teba berlokasi paling selatan. Menurut arah Tri Mandala paling selatan disebut *nista mandala* atau di *tebenan*. Karena tempatnya paling selatan atau *tebenan* sehingga Subak ini disebut Subak Teba. Subak Teba berlokasi di wilayah Kelurahan Abianbase, Pesedahan Yeh Penet, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Luas wilayah Subak Teba 150,6 ha dan memiliki anggota 507 orang. Wilayah Subak Teba ini berbatasan dengan yaitu :

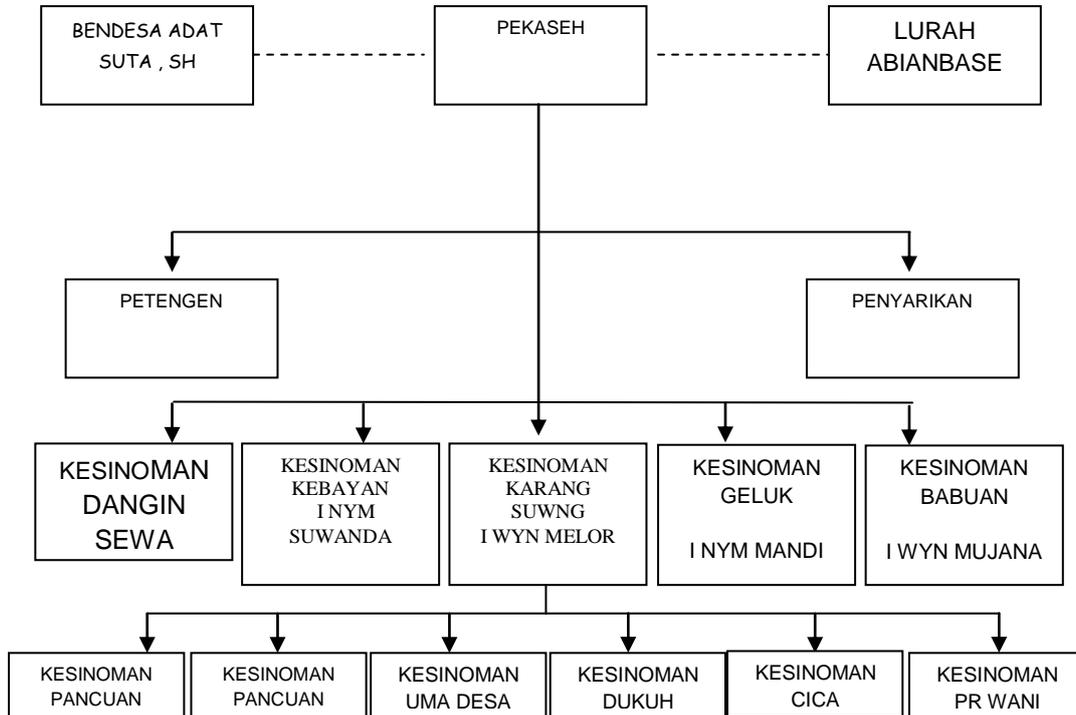
Sisi utara	: Jalan Raya Kapal
Sisi timur	: Sungai Pangi
Sisi selatan	: Jalan Lumbung Lestari
Sisi barat	: Sungai Yeh Penet

Administrasi yang baik merupakan ciri berjalannya sebuah organisasi yang baik di Subak dan menjadi bukti untuk memperoleh ijin pembangunan dalam Persubakan. Subak Teba telah memiliki peraturan yang telah diputuskan pada tahun 1980. Saat Subak Teba mengikuti lomba Subak se-Kabupaten Badung pada tahun 2011, telah diputuskan *awig-awig* Subak Teba tahun 2011. Untuk administrasi pada Subak Teba ada buku-buku administrasi yaitu :

- 1) Buku Daftar Anggota/ *Krama*
- 2) Buku Daftar Prajuru Subak
- 3) Buku Notulen dan Keputusan Rapat Subak
- 4) Buku Program Kerja (Pendek Menengah, Panjang)
- 5) Buku Kegiatan Pelaksanaan Program Subak Jangka (Pendek, Menengah, Panjang)
- 6) Buku Agenda Surat Masuk
- 7) Buku Agenda Surat Keluar
- 8) Buku Ekspedisi
- 9) Buku Inventaris Barang/Peralatan
- 10) Buku Data Kepemilikan Tanah
- 11) Buku Tamu
- 12) Buku Cacakan Absensi Kegiatan
- 13) Buku Kas Harian
- 14) Buku / Daftar Penerimaan Iuran Penggalan Dana

a. Struktur Organisasi Subak

Gambar 1
Struktur Organisasi Subak Teba Abianbase



Sehubungan dengan pekerjaan di Subak yang diketuai oleh Pekaseh dan dibantu oleh Petengen, Penyarikan, Kesinde. Jika ada pekerjaan yang telah direncanakan atau pekerjaan yang mendadak, tentunya akan dikerjakan oleh anggota Subak Teba (*krama* Subak) secara bersama-sama atau bergotong royong menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pengurus dalam subak tentunya memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, yaitu :

- 1) Tugas (Ketua Subak dan Sekretaris) *Pekaseh* dan *Penyarikan*
 - a) Membuka rapat dan memastikan keputusan serta menuntun *krama* dalam menjalankan peraturan (*awig-awig*) dan pendapat *krama* Subak.
 - b) Menghadiri upacara keagamaan di tingkat Kabupaten yang melibatkan banyak subak lainnya atau ditingkat provinsi.
 - c) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan gotong royong berkaitan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan.
 - d) Memberitahukan segala perubahan-perubahan yang terkait dengan subak
 - e) Mencatat yang patut dicatat dalam keputusan rapat.
 - f) Mewakili subak dalam pertemuan undangan rapat dari pemerintah bahkan dari subak lain menurut peraturan yang ada.
 - g) Memimpin rapat-rapat subak baik rapat pengurus maupun rapat anggota.
 - h) Melaksanakan peraturan-peraturan sedemikian rupa sehingga terwujud keamanan, ketertiban, dan keharmonisan, persatuan dan kesatuan dalam subak yang dipimpinnya.
 - i) Menyampaikan informasi tentang adanya instruksi dari pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh subak.

- j) Menyelesaikan segala bentuk konflik atau perselisihan yang terjadi baik antaranggota, pengurus maupun dengan subak lainnya.
 - k) Memberikan pertanggungjawaban atas aset subak terutama masalah keuangan, dan hasil pencapaian program-program subak yang dimandatkan oleh anggota selama kepemimpinannya.
 - l) Membantu dalam memungut pajak tanah atau pajak bumi milik para anggotanya serta denda.
 - m) Mengatur pengalokasian dan pendistribusian air irigasi di antara para anggotanya berdasarkan kesepakatan subak.
- 2) Tugas Petengen
- a) Mengelola keuangan dan segala yang berkaitan dengan uang Subak.
 - b) Mencatat pengeluaran dan pemasukan Subak.
 - c) Membuatkan laporan keuangan yang ada di Subak
 - d) Membantu pekerjaan ketua Subak (*pekaseh*)
- 3) Tugas Kesinoman (Ketua Wilayah)
- a) Melaksanakan segala pekerjaan yang ada di masing-masing *munduk*.
 - b) Memberikan laporan kepada ketua subak (*pekaseh*) tentang segala hal yang telah dilakukan.
 - c) Dapat memperlihatkan segala pekerjaan yang ada di masing-masing *munduk*.
 - d) Membantu pekerjaan ketua subak (*pekaseh*).
 - e) Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh ketua subak kepada anggota masing-masing *munduk*.
 - f) Memberikan informasi kepada anggota subak di masing-masing *munduk*.
 - g) Melakukan tugas pengabsenan di masing-masing *munduk* ketika bekerja dan rapat.

Sebagai organisasi tradisional yang bersifat turun menurun yang bergerak dalam pengelolaan irigasi atau pengairan dalam pertanian yang bersifat social, subak beranggotakan para petani yang berada pada suatu wilayah tertentu pelaksanaannya diatur oleh suatu aturan yang disebut *awig-awig*. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi subak tidak hanya sebatas pada pengaturan pengairan sawah saja, namun juga pada kegiatan yang bersifat social dan religious. Landasan yang dipegang teguh oleh organisasi subak adalah *Tri Hita Karana* yang terdiri dari unsure -unsur *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. *Parahyangan* mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, yang diwujudkan dengan senantiasa memanjatkan ubakpuji syukur dan rasa terima kasih dalam bentuk kegiatan upacara keagamaan yang dilakukan di tempat suci atau Pura Ulun Subak setiap enam bulan sekali. *Palemahan*, hubungan manusia dengan alam atau lingkungan tercermin dari kegiatan pokok subak yaitu mengatur irigasi di areal pertanian dengan menjaga kelangsungan dan kelestarian alam. *Pawongan* mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya tercermin dari aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh anggota/ *karma* subak dalam mengerjakan berbagai pekerjaan di sawah dengan penuh rasa kekeluargaan dan gotong royong.

Sumber pendanaan subak pada awalnya hanya berasal dari intern saja, yaitu berasal dari sumbangan dan uang pangkal para karma subak yang merupakan pendiri subak, iuran rutin karma subak, denda yang dikenakan pada karma yang melanggar *awig-awig*, dan iuran khusus (*peturun*) jika ada upacara di pura ulun subak dan upacara lain. Seiring berjalannya waktu keberadaan subak mendapat perhatian dari pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dengan memberikan bantuan dana untuk membantu pelaksanaan kegiatan subak.

Dalam pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, kegiatannya secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pada tahap pertama adalah tahap penerimaan dana yang bersal dai internal maupun eksternal subak, tahap kedua adalah pengeluaran kas saat membiayai semua keperluan kegiatan subak dan yang ketiga adalah tahap

pertanggungjawaban penggunaan dana dalam kurun waktu atau periode tertentu. Pengelolaan keuangan Subak Teba, kemudian dipertanggungjawabkan kepada seluruh *krama subak* secara terbuka pada kegiatan rapat rutin (*sangkepan*). Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Subak akan segera dilaksanakan setelah suatu kegiatan berlangsung, biasanya seminggu setelah kegiatan seperti pada saat selesainya kegiatan upacara piodalan di Pura Ulun Subak.

Subak sebagai organisasi/lembaga tradisional kecil yang beranggotakan masyarakat mayoritas petani, dianggap tidak begitu memerlukan penerapan *good corporate governance* dalam pelaporan keuangannya untuk menjaga keberlangsungan subak. Namun sekarang dari sektor pertanian, subak di Bali merupakan warisan budaya Indonesia dan telah diakui UNESCO. Dengan demikian subak bukan hanya merupakan lembaga tradisional saja namun bagian aset penting untuk Indonesia sebagai warisan budayanya. Subak yang notabene memiliki otonomi rumah tangga sendiri maka dari itu diperlukannya penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan keuangan agar keberlangsungan subak dapat ditata kelola dengan baik.

Selain memiliki otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri, subak juga menerapkan prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Semua prinsip tersebut pada hakikatnya adalah refleksi dari *good corporate governance*. *Governance* subak adalah pembentukan aturan-aturan kerja yang spesifik untuk mengalokasikan, memberikan tanggung jawab dalam memobilisasi sumberdaya, menyelesaikan perselisihan, mencatat informasi, mengumumkan informasi, memilih dan memberikan imbalan kepada pengurus dan petugas-petugas yang lainnya, serta memberikan sanksi-sanksi kepada pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada.

Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai organisasi. Dalam organisasi subak yang bersifat tradisional, anggota/*krama* subak masih memegang teguh rasa saling percaya yang sangat kuat antara *krama* dan pengurus subak. Prinsip transparansi telah diterapkan dalam organisasi subak di setiap ada rapat subak, dimana *pekaseh* melaporkan kepada anggotanya apa yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan, rencana kegiatan dan bagaimana hasil dari apa yang telah dikerjakan. *Krama* subak Teba Abianbase yang rata-rata sudah berumur lebih dari 50 tahun dan tingkat pendidikan yang rata-rata rendah, saat *pekaseh* melaporkan keuangan subak mayoritas *krama* subak mempercayakan segala urusan subak seperti pengelolaan dana dan pembayaran iuran atau subsidi kepada pengurus yang dianggap lebih mengerti dan paham. Jika ada *krama* ataupun pengurus terbukti bersalah atas pelanggaran yang dilakukan dalam hal keuangan ataupun sanksi yang dikenakan harus siap menanggung resiko yang tentunya melalui kesepakatan bersama.

Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelola sehingga pengelolaan organisasi/perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Dalam pengelolaan subak Teba, sudah terdapat kejelasan fungsi dari masing-masing pengurus. Pekerjaan di Subak yang diketuai oleh *Pekaseh* dan dibantu oleh *Petengen*, *Penyarikan*, *Kesinoman* dan segala pelaksanaan dalam mencapai tujuan bersama tentunya akan dikerjakan oleh anggota Subak Teba (*krama* Subak) secara bersama-sama atau bergotong-royong. Pengurus dalam subak tentunya memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dalam penelitian ini tentunya prinsip akuntabilitas organisasi subak Teba Abianbase, setiap pengurus dan anggotanya dapat mengawasi tanggung jawabnya masing-masing. Dari urusan pengelolaan keuangan subak yang dilaporkan dengan laporan kas subak Teba Abianbase yang sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam organisasi.

Pertanggungjawaban (Responsibility), dalam *good corporate governance* berarti kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku

Prinsip responsibility atau tanggung jawab pada pada organisasi Subak Teba Abianbase sudah dilaksanakan dengan baik, yang diwujudkan dalam pengelolaan organisasi keseluruhan maupun dalam pengelolaan keuangan organisasi selalu menjunjung tinggi oleh rasa saling percaya dan semangat gotong royong dalam organisasi Subak. Dengan demikian dapat menciptakan suasana organisasi yang harmonis serta meminimalisir segala penyimpangan atau pelanggaran peraturan subak yang telah disepakati bersama.

Kemandirian (Independency), yaitu suatu keadaan dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.

Kemandirian sebuah organisasi tentunya dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan organisasinya. Organisasi Subak Teba Abianbase sendiri memiliki kas subak sendiri dari iuran para anggotanya. Namun dalam membangun infrastruktur subak sendiri belum mampu dibiayai swadaya oleh subak sendiri. Bantuan dari pihak eksternal yaitu pemerintah biasanya diperoleh dalam kelangsungan organisasi subak. Dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari *karma*/anggota subak dan dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah dikelola dengan baik oleh pengurus subak demi kepentingan bersama, tanpa memasukkan unsure kepentingan lain diluar apa yang disepakati dalam rapat anggota subak sesuai dengan peraturan yang disepakati bersama yaitu awig awig subak Teba. Organisasi Subak Teba Abianbase dalam pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di subak tidak sepenuhnya dibiayai sendiri melainkan adanya bantuan-bantuan pihak terkait yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan kejelasan dananya dalam rapat anggota subak.

Fairness dalam *good corporate governance* dapat diartikan sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Subak Teba Abianbase dalam penerapan prinsip *fairness* terwujud kegiatan pembagian pengairan di sawah yang dikenal dengan istilah saling "*mejangka*" yang artinya dalam pembagian jatah air untuk pengairan sawah, air dibagi secara adil dan sesuai kesepakatan bersama. *Karma*/anggota subak tidak boleh mengambil jatah air *karma* yang lain, berbuat curang dengan menutup aliran air *karma* lain. Dalam hal pengelolaan organisasi subak tidak ada tumpang tindih antara krama dan pengurus subak, semua bekerja sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Juga dalam mengambil keputusan mengenai sesuatu hal, semua *karma* subak punya hak yang sama dalam mengemukakan pendapat dan berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pengurus dalam pengelolaan subak. Dalam hal pengelolaan keuangan di Subak Teba, pelaporan penggunaan keuangan berupa Laporan kas keuangan subak yang disajikan secara terbuka saat rapat sehingga anggota subak dapat memahami dalam penggunaannya. Dengan demikian krama subak tidak merasa dibodohi atau dirugikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Praktik penerapan *good corporate governance* pada pengelolaan Subak Teba Abianbase terlihat dari tanggungjawab organisasi subak dalam melaporkan laporan keuangannya yang memenuhi karakteristik kualitas informasi akuntansi yaitu penyajian jujur, netral, dapat dipahami krama subak, Kualitas informasi akuntansi ini tentunya akan menjadi tolok ukur untuk sebuah organisasi seperti Subak yang masih bersifat sederhana dalam pengelolaan keuangannya sudah menerapkan prinsip *good corporate governance* sejak zaman dahulu yang diwujudkan dalam

berbagai kegiatan subak yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan fairness yang sudah dilakukan sejak dahulu dalam menjalankan organisasinya tanpa disadari. Sehingga krama subak tidak hilang kepercayaan terhadap organisasi subak dan dapat selalu menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan gotong royong.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan kepada pihak pengurus Subak Teba Abianbase adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam Praktik asas Transparansi diharapkan pengurus subak pada saat melaporkan laporan kas keuangannya dapat memberikan penjelasan yang tepat dan akurat agar semua anggota dapat memahami dan puas sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang berkualitas kepada anggotanya tidak hanya sekedar memberikan kepercayaan.
- 2) Dalam Praktik asas akuntabilitas pengurus subak diharapkan dapat lebih meningkatkan kebijakan yang terkait dengan pendanaan dan peraturan subak agar lebih meminimalisir penyimpangan yang tidak diharapkan.
- 3) Dalam Praktik asas Responsibility maka dalam Praktik asas organisasi Subak agar terus berupaya meningkatkan kinerja pengurus subak dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas subak sehingga dapat menghasilkan pertanggungjawaban laporan keuangan yang berkualitas untuk keberlangsungan organisas tidak hanya dalam bentuk laporan penggunaan kas saja tapi disusun laporan keuangan yg bersifat sederhana.
- 4) Dalam Praktik asas independensi yang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi pada laporan keuangan Subak Teba Abianbase sebaiknya pengurus subak lebih memaksimalkan pendanaan swadaya untuk pemeliharaan dan keperluan administrasi subak serta pertanggungjawaban keuangannya secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
- 5) Dalam Praktik asas *fairness* pengurus subak agar tetap menyajikan secara terbuka laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga anggota subak dapat memahami dengan lebih baik dan menghindari manipulasi dalam pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra Pradana, dkk. 2015. Konsep Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Kasus pada Gereja Kerasulan Baru di Indonesia, Distrik Jawa Timur dan Bali). E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015). Universitas Pendidikan Ganesha. Diakses tanggal 4 September 2016.
- Budhi, Made Kembar Sri dan Lestari, Ni Putu Nina Eka. 2016. Community Based Ecotourism Development in Jatiluwih Village Bali. *International Journal of Applied Business and Economic Reseach*. Volume 14 Number 3. ISSN 0972-7302. Seril Publication PVT. LTD. New Delhi. India
- Citra, Nesia Elva. 2013. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Di Kota Padang).E-Journal Universitas Negeri Padang.Diakses pada tanggal 6 Oktober 2015.
- Endra. 2014. Karakteristik Tata Kelola Keuangan Organisasi Nirlaba.
<http://learn.or.id/karakteristik-tata-kelola-keuangan-organisasi-nirlaba/>. (Disarikan dari buku: *Akuntabilitas Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil*, Penulis: Eko Komara Kurniawan, Hal: 18-20.)

- Fatimmah, Jeanny dan R. Ait Novatini. 2012. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Survei Pada Tiga Perusahaan Bumh Di Bidang Jasa Di Bandung). Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2227/31.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 14 September 2016.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi Cetakan 13. Rajawali Pers. :Jakarta
- Hermawati, Sri dan Diptarina Yasmeeen. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Volume 20 No. 1, April 2015. Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Diakses tanggal 14 September 2016.
- Martani, Dwi. 2015. Pelaporan Akuntansi Nirlaba. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2016.
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (*Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*). *Jurnal Ekonomi Bisnis* Universitas Negeri Padang.
- Sutawan, Nyoman. 2008. *Organisasi dan Manajemen Subak Di Bali*. Pustaka Bali Post. : Denpasar
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Edisi 1 Cetakan 2. Sinar Grafika. Jakarta
- Supangat, Drs. Andi. 2007. *Statiska : Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Kencana Prenanda Media Group. Jakarta
- Yuniarta, dkk. 2015. Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Lembaga Lokal Subak Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Pedesaan. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* (Volume 3 No. 1 Tahun 2015). Universitas Pendidikan Ganesha. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/5384/4033>.